

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan menjadi tulang punggung dalam peningkatan perekonomian desa serta mendorong kemandirian dan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sejak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes memperoleh dasar hukum yang kuat untuk beroperasi, dan status badan hukum BUMDes semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur bahwa BUMDes wajib berbadan hukum. Dengan status badan hukum, BUMDes diharapkan dapat beroperasi secara lebih profesional, transparan, dan akuntabilitas, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Namun, realitas dilapangan menunjukkan gambaran yang kontras. Dengan adanya payung hukum yang telah tersedia dan mendorong profesionalisme semakin kuat, masih banyak BUMDes yang belum berbadan hukum salah satunya dikarenakan kurangnya pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes (Aslamiyah et al., 2024). Fenomena ini terjadi di Kabupaten Sampang, dengan hampir seluruh desa di Kabupaten Sampang telah membentuk BUMDes, banyak diantaranya yang tidak aktif atau mengalami stagnasi usaha. Dengan realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun BUMDes telah berdiri, pengelolaannya sering menghadapi hambatan yang menghambat perkembangan pengelolaan BUMDes. Adapun salah satu fenomena yang mencolok adalah kurangnya pemahaman pengelola BUMDes dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta pengawasan yang kuat, sehingga banyak BUMDes yang lemah dalam pengelolaan laporan keuangan untuk bisa

membangun perekonomian desa (Kurniasi et al., 2024). Dengan keterbatasan pemahaman pengelola dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, akibatnya, menjadi hambatan dalam pengembangan unit usaha BUMDes, dan dapat mengakibatkan usaha BUMDes tidak berjalan lama, hanya sedikit program usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes (Mu'minin et al., 2024)

Gejala masalah yang muncul meliputi manajemen yang masih bersifat manual dan kurang profesional, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan BUMDes (Sari et al., 2025). Adapun contohnya pada salah satu BUMDes di Kabupaten Sampang dimana rencana awal penyusunan berbeda dengan berjalannya BUMDes itu sendiri karena keterbatasan pengelolaan yang kurang transparan dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dana (Pandia et al., 2023).

Dampak dari permasalahan keterbatasan pengelolaan keuangan BUMDes yang kurang transparan menjadikan BUMDes tidak mengoptimalkan pengelolaan keuangan BUMDes (Pakamundi, 2022). Dengan menumbuhkan pembangunan desa yang berkelanjutan sulit terjangkau, dengan faktor penghambat utama, dimana BUMDes umumnya belum memiliki kompetensi manajerial dan keuangan yang memadai (Widiastuti et al., 2022). Akibatnya, resiko kecurangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan tetap tinggi, sementara pengendalian internal masih lemah, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional BUMDes (Violetta et al., 2021)

Dalam kondisi hambatan utama dalam pembangunan desa tersebut sejalan dengan pernyataan (Ardilla & Mulyadi, 2022) yang menegaskan bahwa

banyak BUMDes yang belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas, kondisi ini menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat, akibatnya BUMDes kerap gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan. (Marlina & Purba, 2021) menegaskan pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik agar data keuangan yang dihasilkan akurat, objektif, dan lengkap. Keberhasilan pengelolaan BUMDes tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada sikap dan kesadaran para pemangku kepentingan desa (Ilham et al., 2025).

Penelitian sebelumnya (Erlina et al., 2020; Haeruddin & Mariana, 2021; Lubis et al., 2023; Titioka et al., 2020) telah mengevaluasi beberapa faktor dalam hambatan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pencatatan keuangan BUMDes masih sangat sederhana, seringkali hanya berupa pencatatan kas masuk dan keluar tanpa standar akuntansi yang jelas. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama karena pengurus belum memahami tata kelola keuangan yang benar. Lemahnya struktur organisasi, serta rendahnya transparansi keuangan menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat pertumbuhan usaha. Meskipun pemerintah telah memberikan pelatihan dan sosialisasi, implementasi sistem informasi akuntansi berbasis perangkat lunak masih rendah karena kurangnya pemahaman dan motivasi pengurus BUMDes. Kemampuan manajerial yang rendah menjadi penyebab kelemahan program kerja BUMDes belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada pengembangan ekonomi desa.

Gap riset yang ditemukan meskipun telah banyak penelitian yang mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDes, masih terdapat kekurangan dalam

pemahaman mendalam mengenai hambatan-hambatan pengelolaan keuangan yang lebih spesifik, terutama di Kabupaten Sampang. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada analisis umum mengenai hambatan pengelolaan keuangan tanpa menggali lebih dalam keseluruhan hambatan lain yang dapat juga mempengaruhi pengelolaan keuangan BUMDes. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih terfokus untuk memahami lebih spesifik mengenai hambatan pengelolaan keuangan BUMDes terutama pada Kabupaten Sampang.

Menanggapi berbagai hambatan pengelolaan BUMDes yang kompleks tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada salah satu BUMDes yang yaitu BUMDes BNDJY pada Kabupaten Sampang. Penelitian ini memilih salah satu BUMDes di Kabupaten Sampang dikarenakan pada BUMDes BNDJY memiliki beberapa hambatan yang lebih kompleks daripada BUMDes yang lain. Meskipun sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan dukungan pemerintah, pengelolaan keuangannya masih belum optimal dan sangat lemah. Hal ini sejalan dengan temuan (Widiastuti et al., 2022) yang menyatakan bahwa banyak BUMDes yang menghadapi hambatan yang kompleks, dimana kurangnya pemahaman manajerial dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor utama yang menghambat berjalannya BUMDes.

Dampak dari hambatan pengelolaan keuangan BUMDes ini sangat nyata. Banyak BUMDes yang tidak mampu memanfaatkan potensi lokal secara optimal, bahkan beberapa di antaranya mengalami stagnasi atau kemacetan usaha. Misalnya (Anggun, 2021) menemukan bahwa tanpa perencanaan usaha yang matang dan pelaporan yang baik, pengelolaan keuangan BUMDes menjadi tidak maksimal dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi desa menjadi

sangat terbatas.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik menganalisis hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Sampang. Penelitian ini tidak hanya fokus pada satu hambatan akan tetapi menganalisis hambatan-hambatan yang kompleks dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian ini penting karena masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas lebih mendalam tentang beberapa hambatan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes. Hasil dari penelitian ini juga bisa menjadi bahan evaluasi dan referensi yang berguna bagi pemerintah daerah maupun pengelola BUMDes. Dengan bisa merumuskan kebijakan, strategi, dan program pendampingan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dinamika hambatan pengelolaan BUMDes yang dialami dalam pengelolaan BUMDes.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolaan BUMDes BNDJY di Kabupaten Sampang, khususnya terkait pengelolaan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes BNDJY, khususnya terkait pengelolaan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu bidang pengelolaan keuangan BUMDes. Secara khusus, penelitian ini fokus pada

hambatan-hambatan secara menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan BUMDes dengan menggunakan teori governance. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi hambatan-hambatan lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan BUMDes. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap hambatan-hambatan internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan keuangan BUMDes, penelitian ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi pada peningkatan kinerja BUMDes, termasuk aspek inovasi manajemen, teknologi informasi akuntansi, dan interaksi sosial dalam konteks desa.

1.4.1 Manfaat Empiris

Penelitian ini memberikan data dan informasi yang relevan mengenai hambatan dalam sistem laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang. Temuan penelitian ini menunjukkan beberapa hambatan utama, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keuangan, kurangnya transparansi dan pemisahan keuangan, serta minimnya dukungan dan pendampingan dari pemerintah daerah. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes yang pada gilirannya memengaruhi kinerja BUMDes dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi desa. Penelitian juga mengungkap rendahnya partisipasi masyarakat dan kepercayaan terhadap pengelolaan BUMDes sebagai faktor eksternal yang turut menghambat keberhasilan pengelolaan keuangan.

Dengan hasil temuan tersebut, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes, khususnya dalam aspek tata kelola keuangan. Selain itu,

temuan ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut di daerah lain dengan konteks yang serupa, guna mengembangkan strategi pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengetahuan empiris tetapi juga memberikan pijakan praktis bagi pengambil kebijakan dan pengelola BUMDes agar dapat mengidentifikasi hambatan secara tepat dan merancang intervensi yang relevan dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja BUMDes di berbagai wilayah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan maupun hambatan BUMDes agar lebih efektif dan optimal. Temuan ini juga dapat menjadi evaluasi bagi pengurus BUMDes untuk memperbaiki pengelolaan BUMDes, sistem keuangan, meningkatkan pendapatan asli desa, serta dapat memperkuat ekonomi desa secara kolektif.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat praktis penting bagi pemerintah daerah (Pemda) serta pemerintah desa (Pemdes) dalam rangka memperkuat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bagi Pemdes, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hambatan-hambatan yang terjadi, Pemdes dapat merumuskan strategi internal yang lebih tepat sasaran, memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan, serta mengoptimalkan potensi sumber daya desa untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian lokal.

Sementara itu, bagi Pemda, penelitian ini memberikan dasar empiris untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan strategis dalam mendampingi dan mengawasi BUMDes di wilayahnya. Pemda dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan untuk mengembangkan program pelatihan, pendampingan teknis, dan fasilitasi yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini sangat penting agar layanan pendampingan dan pembinaan yang diberikan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyentuh akar permasalahan yang dihadapi oleh pengelola BUMDes. Selain itu, Pemda dapat memformulasikan regulasi atau insentif yang mendukung kolaborasi antara BUMDes dengan sektor swasta maupun lembaga keuangan untuk memperkuat jejaring usaha desa.

Dengan koordinasi yang baik antara Pemda dan Pemdes berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan tercipta sinergi yang mampu mendorong keberlanjutan BUMDes melalui peningkatan kapasitas manajemen, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat desa. Hal ini tentunya akan berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan asli desa (PADes), pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Pendekatan yang berbasis bukti dari penelitian ini juga akan mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa.